

FAKTOR PENDORONG KEPULAUAN SOLOMON MENYEPAKATI KERJA SAMA *BELT AND ROAD* *INITIATIVE* (BRI) DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013-2019

Kadek Andhika Wiratama¹, Ni Wayan Rainy Priadarsini², Adi Putra Suwecawangsa³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: awiratama1@gmail.com, rainypriadarsini@yahoo.com, adisuwecawangsa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Solomon Islands decided to shift their diplomatic recognition to China after having diplomatic relations with Taiwan over 36 years. China and Taiwan are two countries that have rivalries in the South Pacific in their capability to provide diplomatic recognition. The influence of China in the South Pacific increase due to Belt and Road Initiative (BRI) program that provide assistance of infrastructure development. China economic increased influence has an impact on changes in regional geopolitical maps, also influencing the foreign policy of the region countries including Solomon Islands. This research is to explain the determinants of Solomon islands foreign policy to shift diplomatic recognition and sign BRI. The writer of this research use theory determinants of foreign policy by William D. Coplin

Keywords : *Belt and Road Initiative, China, Determinants of Foreign Policy, Solomon Islands*

PENDAHULUAN

Eksistensi hubungan luar negeri Kepulauan Solomon sebagai negara yang berdaulat dimulai pada tahun 1978. Kepulauan Solomon merupakan negara bekas jajahan Inggris. Oleh karena itu meskipun telah merdeka dari negara koloni namun pada dasarnya negara Kepulauan Solomon lebih banyak berinteraksi dengan negara-negara Barat yang merupakan aktor tradisional yang dijuluki sebagai *Western Lake*.

Setelah kemerdekaan tahun 1978, pemerintah Kepulauan Solomon mulai mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, namun pada saat yang sama Kepulauan Solomon mengirim delegasinya ke Taipei. Hal ini membuat persaingan terjadi antara Tiongkok dan Taiwan dalam memperebutkan pengakuan diplomatik. Namun pada tahun 1983 Kepulauan Solomon memutuskan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan

Taiwan yang sampai saat ini terjalin sampai dengan 36 tahun (Kabutaulakan, 2010).

Kontribusi Taiwan terhadap kepulauan Solomon secara rutin diberikan melalui bantuan luar negeri pada sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan di kepulauan Solomon. *Rural Constituency Development Fund* (RCDF) atau dana pembangunan pedesaan merupakan salah satu contoh dukungan ekonomi Taiwan kepada kepulauan Solomon yang dilaporkan bahwa pada 2017 Taiwan telah menyalurkan dana sebesar \$29,3 juta. Sebagai imbalannya, Kepulauan Solomon menyuatkan dukungan untuk partisipasi Taiwan di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (Yin, 2018). Selama 36 tahun yakni dari tahun 1983 dan 2019, Taiwan telah memberikan bantuan sebesar \$ 460 juta kepada Kepulauan Solomon. Namun Kepulauan Solomon merasa Taiwan tidak dapat memberikan bantuan yang cukup seperti yang diharapkan Kepulauan Solomon terutama pada kebutuhan infrastruktur.

Maka dari itu Kepulauan Solomon saat ini memutuskan mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke Tiongkok yakni pada September 2019, dan membuat negara Pasifik Selatan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan hingga saat ini berkurang menjadi empat. Pengalihan pengakuan diplomatik ini seiring dengan Tiongkok yang mulai meningkatkan perhatiannya ke Pasifik Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan bantuan ekonomi kepada negara-negara pasifik

selatan oleh Tiongkok sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang mencapai US\$ 1,05 triliun (Zhang, 2020). Peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan membuat perubahan tatanan internasional yang sebelumnya dipengaruhi oleh Amerika Serikat kini dihadapkan dengan Tiongkok yang bahkan telah menggantikan Jepang menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia (BBC, 2011)

Bukti kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat ini juga ditunjukkan melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dibiayai oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok. BRI merupakan salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden Tiongkok yakni Xi Jinping dalam pidatonya di Nazarbayev University, Kazakhstan pada 7 September 2013. Inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) ini terbagi kedalam dua jalur, yaitu jalur perdagangan darat yang dikenal dengan *Silk Road Economic Belt* (SREB) dan jalur laut atau *Twenty-First Century Maritime Silk Road* (Liu, 2018). Kedua jalur tersebut menghubungkan Tiongkok dengan berbagai kawasan, salah satunya yaitu jalur kepulauan Pasifik. Program BRI memberikan implikasi geostrategis, ekonomi, dan politis yang cukup besar terhadap Kawasan kepulauan pasifik, salah satunya Kepulauan Solomon yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

Kepulauan Solomon mendantangi BRI selama kunjungan perdana Menteri

Mannasseh Sogavare pada Oktober 2019, yang mana kebijakan ini juga menyelaraskan inisiatif Tiongkok dengan strategi pembangunan nasional Kepulauan Solomon 2016-2035 (Zhang, 2019). Dalam kerja sama ini Tiongkok menawarkan bantuan yang mencakup sembilan provinsi dan daerah perdesaan pada sektor pertanian, perikanan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan yang lainnya (China Embassy, 2019). Kepulauan Solomon mendatangai BRI selama kunjungan perdana Menteri Mannasseh Sogavare pada Oktober 2019, yang mana kebijakan ini juga menyelaraskan inisiatif Tiongkok dengan strategi pembangunan nasional Kepulauan Solomon 2016-2035 (Zhang, 2019). Dalam kerja sama ini Tiongkok menawarkan bantuan yang mencakup sembilan provinsi dan daerah perdesaan pada sektor pertanian, perikanan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan yang lainnya (China Embassy, 2019). Serta pembangunan proyek infrastruktur senilai \$825 juta yang mencakup Pelabuhan, jalan, rel, kereta api, jembatan, dan stasiun tenaga air serta pengaktifan kembali proyek tambang yang sebelumnya ditinggalkan (GCR Staff, 2019). Meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan cukup lama hubungan bilateral yang kuat antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok justru terlihat dalam sektor perdagangan. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Kepulauan Solomon dengan volume perdagangan 14 kali lipat dari volume perdagangan Taiwan. Menurut data *World Bank*, pada tahun 2017 Kepulauan Solomon

mengekspor komoditas senilai \$554,8 juta atau dua pertiga dari total eksportnya dan 87% berasal dari produk kayu (Zhang, 2019).

Disamping adanya potensi dan peluang yang cukup besar bagi Kepulauan Solomon dalam rangka membangun infrastruktur serta memperluas investasi dan perdagangannya, masih terdapat banyak anggapan bahwa BRI menimbulkan kekhawatiran yang dipandang sebagai dominasi Tiongkok, yang mana wilayah Pasifik Selatan seperti Kepulauan Solomon rentan mengalami gejolak internal yang diakibatkan dari kontestasi antara Tiongkok dan Taiwan (Li, 2020). Dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai mengapa Kepulauan Solomon memutuskan untuk mengalihkan pengakuan diplomatiknya dan bergabung dalam BRI. Bergabungnya Kepulauan Solomon dalam BRI menjadi menarik untuk dibahas dengan melihat adanya kontroversi terkait skema BRI dan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan dalam konstelasi pengalihan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon.

1. KAJIAN PUSTAKA

Literatur pertama penulis menggunakan tulisan dari Tarcisius Tara Kabutaulakan yang berjudul *Milking the Dragon in Solomon Island*. Tulisan Kabutaulaka menjelaskan persaingan Tiongkok dan Taiwan di Kepulauan Pasifik terutama di Kepulauan Solomon. Secara khusus tulisan ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi Kepulauan Solomon dalam

mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan implikasinya terhadap keputusan tersebut. Tulisan Kabutaulakan membantu penulis dalam memahami konstelasi politik antara Tiongkok dan Taiwan di Kepulauan Pasifik khususnya Kepulauan Solomon. Tulisan ini menjelaskan sudah terciptanya hubungan dagang antar kepulauan Solomon dengan Tiongkok meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Literatur kedua penulis menggunakan tulisan dari Vinsensio M.A Dugis yang berjudul Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan; Perspektif Realisme Stratejik. Tulisan Dugis menjelaskan bahwa peningkatan Tiongkok di Pasifik Selatan menimbulkan spekulasi bahwa Tiongkok adalah hegemon baru. Kehadiran dan interaksi Tiongkok di Pasifik Selatan tidak hanya melibatkan negara berkembang tetapi juga negara-negara metropolitan di kawasan itu. Perhatian Tiongkok ke Pasifik Selatan semakin meningkat dan intensif yang ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Tiongkok telah tercatat sebagai pendonor terbesar dengan peringkat ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Tiongkok menawarkan berbagai bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, membangun infrastruktur meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer serta megembangkan sumber daya

alam. Bantuan ekonomi ini bersifat tidak mengikat dengan syarat lunak yang menarik bagi negara-negara Pasifik Selatan. Situasi ini membuat Tiongkok dijuluki sebagai “*new banker*” di kawasan Pasifik Selatan. Tulisan Dugis membantu peneliti dalam memahami peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan ditengah kompetisinya dengan aktor tradisional yakni negara-negara barat dan persaingan dengan Taiwan.

Literature ketiga penulis menggunakan tulisan dari Henry Szadziewski yang berjudul *A Search for Coherence: The Belt and Road Initiative in the Pacific Island*. Tulisan Szadiewski menjelaskan bagaimana *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi sarana naratif yang berupaya membawa koherensi internasional dan domestik melalui keterlibatan politik dan ekonomi Tiongkok di luar negeri terutama di kawasan Kepulauan Pasifik. Menurut Smith konteks program bantuan Tiongkok di negara-negara Kepulauan Pasifik membuat persepsi bagaimana komunitas Tionghoa di luar negeri berpengaruh pada citra Tiongkok. Sebaliknya para pejabat Tiongkok memanfaatkan hal tersebut dan membangun koherensi BRI berdasarkan interpretasi tersebut sebagai inisiatif BRI. Meskipun begitu BRI justru membuka peluang bagi negara-negara Kepulauan Pasifik yang sejalan dengan kepentingan bersama. Melalui diplomasi kunjungan, penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU), integrasi dengan strategi pembangunan pemerintah Kepulauan pasifik dan

keanggotaan dalam mekanisme pembiayaan alternatif membuat bagaimana Tiongkok dapat terlibat lebih jauh di Kepulauan Pasifik melalui BRI. Tulisan ini juga membantu peneliti dalam memahami bahwa perubahan politik luar negeri dapat terjadi akibat dari perubahan geopolitik dari peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan melalui skema BRI.

Dari ketiga literature tersebut, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh William D Coplin dalam menganalisa fenomena yang terjadi pada perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon ke Tiongkok dengan menyepakati kerja sama BRI. Menurut William D Coplin kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga determinan, yaitu kondisi politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Sehingga kebijakan luar negeri yang dibuat bukan cerminan keinginan pribadi melainkan hasil dari pertimbangan ketiga faktor determinan tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Tingkat analisis penelitian ini adalah tingkat negara, dengan Kepulauan Solomon yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui analisis data *online* dan dokumen terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONTESTASI ANTARA TIONGKOK DAN TAIWAN DI KEPULAUAN SOLOMON

Tiongkok dan Taiwan merupakan dua tokoh utama dalam rivalitas yang berada di Pasifik Selatan, keterlibatan keduanya disebabkan oleh kapasitas negara Kepulauan Pasifik untuk memberikan pengakuan diplomatiknya. Sejak awal tahun 1970-an, Taiwan telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan diplomatik dan mendapatkan kembali keanggotaan PBB yang hilang pada tahun 1971. Sementara itu disisi lain Tiongkok terus berusaha untuk mengisolasi Taiwan secara diplomatis. Tiongkok berpandangan bahwa Taiwan merupakan provinsi yang membangkang yang menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), maka dari itu Tiongkok merupakan satu-satunya pemerintah yang sah yang mengatur seluruh wilayah Tiongkok dan menolak adanya gagasan "*Two Chinas*". Peluang muncul kepada Taiwan ketika negara Kepulauan Pasifik memperoleh kemerdekaannya dari akhir tahun 1960-an hingga 1980-an, yang mana posisi negara-negara Kepulauan Pasifik cukup strategis dalam memberikan pengakuan diplomatiknya. Namun disisi lain Tiongkok menekan kembali pada pemimpin Kepulauan Pasifik dalam kunjungan resminya ke Beijing untuk menegaskan kembali kepatuhan mereka terhadap prinsip "*One China Policy*".

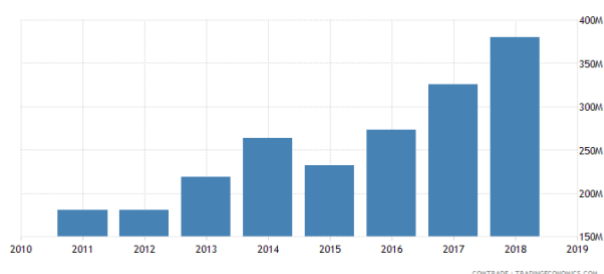
Pada awal tahun 2000 setidaknya 29 negara-negara kecil di Karibia, Amerika Tengah, Afrika dan Pasifik mulai mengakui

Taiwan. Namun usaha ini tidak menyurutkan Tiongkok untuk menekan Taiwan dalam mendapatkan pengakuan diplomatiknya, sehingga membuat beberapa wilayah menjadi ajang rivalitas bagi Tiongkok dan Taiwan dalam mendapatkan pengakuan diplomatiknya (Biddick, 1989). Kepulauan Pasifik menjadi salah satu wilayah yang membuat persaingan Tiongkok dan Taiwan ini menjadi kompetisi diplomatik yang memberikan dampak pada negara-negara Kepulauan Pasifik. Kepulauan Solomon merupakan salah satu negara yang turut mengalami perdebatan antara menetapkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok atau Taiwan yang mana Kepulauan Solomon memiliki hubungan baik dengan keduanya pada tahun 1980-an. Namun Kepulauan Solomon memilih untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan karena tidak mengningkan paham komunisme. Kepulauan Solomon resmi menjalani hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1983 dan mendirikan kedutaan besar pada tahun 2005 (Kabutaulakan, 2010).

Selama 36 tahun Kepulauan Solomon telah mendapatkan banyak manfaat dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan terutama dalam penerimaan bantuan luar negeri. Taiwan telah memberikan bantuan sebesar \$460 juta ke Kepulauan Solomon dalam bentuk *Rural Constituency Development Fund (RCDF)*. Meskipun selama 36 tahun memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan perdagangan

dengan Tiongkok merupakan hal yang menguntungkan bagi perekonomian Kepulauan Solomon

Tabel 4.1.1 Ekspor Kepulauan Solomon ke Tiongkok



Sumber : Trading Economics (n.d)

Pada tahun 2010 hingga 2018 ekspor Kepulauan Solomon ke Tiongkok selalu meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Ekspor Kepulauan Solomon ke Tiongkok pada tahun 2018 bahkan menyentuh nilai US\$ 380 juta atau setara dengan 66,83% nilai ekspor Kepulauan Solomon ke Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok telah menjadi aktor penting dalam urusan kepentingan dan ekonomi Kepulauan Solomon, meskipun Kepulauan Solomon memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Taiwan.

Meskipun Kepulauan Solomon memiliki relasi yang cukup baik terhadap Tiongkok dan Taiwan dalam berbagai bidang, persaingan Tiongkok dan Taiwan masih berlanjut yang mana Tiongkok masih mencoba untuk menekan sekutu Taiwan di negara Kepulauan Pasifik. Persaingan Tiongkok dan Taiwan dalam memperebutkan pengakuan diplomatik kerap menimbulkan gejolak internal di Pasifik

Selatan termasuk Kepulauan Solomon. Hal ini terjadi pada tahun 2006 akibat dari ketidakpuasan pemilihan politisi lama menjadi Perdana Menteri yang diduga menerima suap dari pengusaha asal Tiongkok. Hal ini membuar Australia turut mengintervensi melalui *Regional Assistance Mission to the Solomon Islands* (RAMSI) untuk menstabilkan kondisi keamanan dan politik di Kepulauan Solomon yang menargetkan bisnis Tiongkok di Kepulauan Solomon (Ride, 2019).

Konstetasi antara Tiongkok dan Taiwan tidak hanya melibatkan negara-negara Kepulauan Pasifik namun berimplikasi memulai adanya perubahan geopolitik yang mana negara-negara barat sebelumnya memiliki dominasi di kawasan Kepulauan Pasifik. Hal ini seiring dengan Tiongkok yang telah meningkatkan pengaruhnya dan menggantikan Jepang menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Kehadiran Tiongkok terus berkembang terutama ketika Tiongkok mulai menerapkan inisiatif untuk jalur perdagangan dan transportasi *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diperkenalkan pada tahun 2013 dengan pembentukan lembaga *Asian Infrastructure Investment Bank*. Inisiatif ini kemudian mulai diperkenalkan di Pasifik Selatan pada tahun 2015 dan mendapat respon positif dari pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Fiji, Papua Nugini, Samoa, Tonga, *Cook Islands*, dan Vanuatu kedalam inisiatif BRI dan anggota AIIB (Szadiewski, 2021).

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KEPULAUAN SOLOMON DALAM MENYEPAKATI KERJA SAMA BRI DENGAN TIONGKOK

Indikasi pengalihan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon sering dibicarakan melalui pernyataan resmi dari pemimpin Kepulauan Solomon yang mengatakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa segala sesuatunya dapat berubah. Pada Mei 2013, Perdana Menteri Gordon Lilo menekankan bahwa kebangkitan Tiongkok merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan tetapi harus diperhitungkan dalam perdagangan dan hubungan luar negeri Kepulauan Solomon di masa mendatang. Pada bulan Desember 2014, penggantinya yakni Manasseh Sogavare juga menunjukkan isyarat untuk kemungkinan beralih ke Tiongkok (Zhang, 2019).

Pada tahun 2019 Manasseh Sogavare kembali memimpin Kepulauan Solomon, terpilihnya kembali Manasseh Sogavare menyatakan dalam kepemimpinannya akan meninjau mitra kerja samanya dan terlibat dalam penilaian komprehensif tentang Tiongkok. Hal ini dibuktikan melalui proses pengambilan kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon ini dilakukan melalui pembentukan *Bi-Partisan Task Force* oleh Pemerintah Kepulauan Solomon sebagai langkah untuk menilai keuntungan dari hubungan bilateral saat ini dengan Taiwan dan membandingkannya dengan Tiongkok serta

memberikan strategi bagi pemerintah untuk menghadapi dampak positif dan negatif dari perubahan yang ada.

Hasil laporan yang diterima oleh *Bi-Partisan Task Force* tersebut mengungkapkan bahwa Kepulauan Solomon akan mendapat banyak manfaat jika beralih dan menormalkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Melalui *Ministry of Foreign Affairs and External Relations* Jeremiah Manele, Kepulauan Solomon kemudian mengalihkan pengakuan diplomatiknya pada 21 September 2019 dengan penandatanganan *Joint Communique*. Kemudian pada Oktober 2019 melalui kunjungan Perdana Menteri Mannaseh Sogavare, Kepulauan Solomon turut berpartisipasi dalam *Belt and Road Initiative* melalui penandatanganan MoU antar kedua negara (Bi-partisan Task Force, 2019).

Terdapat beberapa kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon dengan Tiongkok dalam kerangka kerja sama BRI. Tiongkok berkomitmen akan membangun sejumlah proyek infrastruktur di Kepulauan Solomon senilai \$ 825 juta untuk membangkitkan kembali industri pertambangan di Kepulauan Solomon yang juga meliputi Pelabuhan, jalan raya, jalur kereta, jembatan dan pembangkitan listrik tenaga air. Proyek membangkitkan industri pertambangan ini diajukan oleh Beijing pada 26 Oktober 2019 yakni di bekas tambang *Gold Ridge*. Selain itu Kepulauan Solomon juga menyepakati kerja sama strategis dengan Tiongkok terkait menyewakan pulau Tulagi

yang mana memiliki Pelabuhan laut dalam dengan *China Sam Enterprise Group* (AFP, 2019). Tiongkok juga juga berkontribusi dalam pembangunan stadion melalui *China Civil Engineering Construction Corporation* (CCECC) untuk membangun 7 fasilitas olahraga pada 2023 *Pacific Games* (GCR Staff, 2021). Serta kerja sama *sister city* antara provinsi Guangzhou, Tiongkok dan Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Kerja sama BRI ini berguna untuk menyelaraskan inisiatif Tiongkok dengan strategi pembangunan nasional Kepulauan Solomon 2016-2035. Kerja sama ini tentunya akan menguntungkan Kepulauan Solomon yang mana Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Kepulauan Solomon dan Tiongkok akan memberikan perlakuan bebas bea untuk 97% ekspor Kepulauan Solomon, dan membuka jalan untuk lebih meningkatkan ekspor ke pasar Tiongkok dalam kerangka kerja sama BRI (Solomon Islands Government, 2021).

Peralihan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon memiliki dampak terhadap aktor lain termasuk Amerika Serikat dan mitra lainnya karena memiliki dominasi di Pasifik Selatan sejak lama. Hal ini direspon dimana Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menolak untuk bertemu dengan pemimpin Kepulauan Solomon serta meninjau kembali bantuan luar negerinya pasca putusnya hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dengan Taiwan. Hal ini dikarenakan Kepulauan Solomon secara

strategis dan memiliki beberapa Pelabuhan laut dalam yang mengindikasikan dapat digunakan untuk secara langsung menantang aktivitas Amerika Serikat dan mitranya di kawasan tersebut (tktk).

ANALISA FAKTOR PENDORONG KEPULAUAN SOLOMON MENYEPAKATI KERJA SAMA BRI DENGAN TIONGKOK

1. KONTEKS INTERNASIONAL

Konteks internasional atau faktor eksternal memiliki peran penting dalam menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon. William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat dari sistem internasional dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem tersebut akan menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon dalam mengalihkan pengakuan diplomatiknya dilakukan seiring terjadinya perubahan geopolitik yang terjadi akibat dari kebangkitan ekonomi Tiongkok yang meningkat di Pasifik Selatan di tengah dominasi negara-negara Barat. Keputusan Kepulauan Solomon dalam mengalihkan pengakuan diplomatiknya bukan hanya antara sebatas Tiongkok dan Taiwan. Keputusan ini dilakukan dalam konteks saling ketergantungan yang mana status Kepulauan Solomon sebagai negara Kepulauan diantara negara-negara besar yang memiliki pengaruh global yang cukup signifikan.

Menurut laporan *Bi-partisan Task Force* hal ini dikarenakan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan yang selalu meningkat setiap tahunnya melalui penjualan senjata ke Taiwan. Taiwan selalu menjadi pion Amerika Serikat dalam menghadapi peningkatan kehadiran Tiongkok. Amerika Serikat menganggap Taiwan sebagai rantai pulau pertama untuk menahan pengaruh Tiongkok (*Bi-partisan Task Force*, 2019).

Selain itu keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* juga turut mencerminkan suatu alasan bagi Kepulauan Solomon untuk merubah kebijakan luar negerinya ke Tiongkok. Tiongkok di sisi lain telah berkomitmen dan menyepakati perjanjian *Paris Agreement* Hal ini menjadi perhatian besar bagi Kepulauan Solomon yang rentan terkena dampak dari perubahan iklim dengan meminta bantuan dari Tiongkok (Westerman, 2019).

2. Kondisi Politik Domestik Kepulauan Solomon

Menurut William D Coplin Dalam pengambilan kebijakan terdapat aktor-aktor yang mempengaruhi perilaku politik luar yang disebut sebagai *Policy Influencer*, yang terdiri dari empat kategori yakni: *Bureaucratic influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer*. "*bureaucratic influencer*" atau yang biasa disebut sebagai aktor birokrasi yang memengaruhi terbentuknya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kepulauan

Solomon yang mana individu serta organisasi di dalam Lembaga eksekutif pemerintah membantu pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan luar negeri.

Dalam pengalihan pengakuan diplomatik yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon ke Tiongkok, setidaknya terdapat dua aktor penting dalam birokrasi yang memiliki akses dalam menyalurkan informasi ke pembuat keputusan, yakni *Bi-Partisan Task Force* dan *Ministry of Foreign Affairs & External Trade* (MFAET). *Bi-Partisan Task Force* memiliki peran penting untuk menilai keuntungan dari hubungan bilateral saat ini dengan Taiwan dan membandingkannya dengan Tiongkok serta memberikan strategi bagi pemerintah untuk menghadapi dampak positif dan negatif dari perubahan yang ada (*Bi-Partisan Task Force*, 2019)

Dukungan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap pengalihan pengakuan diplomatiknya ke Tiongkok juga berasal dari MFAET. Dalam hal ini sebagai aktor yang menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan kewenangan khusus dalam mengatur hubungan luar negeri (MFAET, 2016). Dalam hal ini penandatanganan *Joint Communique* antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon merupakan wewenang MFAET dalam ketentuan tersebut. pembentukan kerja sama dan peninjauan manfaat yang telah ditanda tangani oleh MFAET merupakan respon lanjutan dari informasi yang diperoleh dari *Bi-Partisan Task Force* melalui analisa

untung dan rugi dalam meninjau hubungan luar negeri dengan Tiongkok dan Taiwan.

3. SITUASI KONDISI EKONOMI DAN MILITER KEPULAUAN SOLOMON

William D.Coplin juga menjelaskan mengenai kondisi ekonomi dan militer suatu negara yang menjadi faktor determinan kebijakan luar negeri. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan dan bantuan dari sumber-sumber luar negeri. Jika dikaitkan dalam penelitian ini maka menjadi penting untuk melihat kondisi ekonomi dan kestabilan internal kemampuan internasional Kepulauan Solomon pasca berakhirnya RAMSI.

Kepulauan Solomon pada awalnya terjadi gejolak internal yang menimbulkan kerusakan pada tahun 2006. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan pemilihan politisi lama menjadi Perdana Menteri, dan bisnis Tiongkok yang mendominasi sektor pertambangan, perikanan, dan juga ritel di Honiara. Hal ini membuat Australia turut mengintervensi dengan mengirimkan *Regional Assistance Mission to Solomon Islands* (RAMSI) untuk menstabilkan kondisi keamanan dan politik di Kepulauan Solomon hingga tahun 2017 (Wyeth, 2017). Dengan melakukan perubahan kebijakan luar negeri ke arah Tiongkok, Kepulauan Solomon kemungkinan akan memicu kembali peristiwa yang sama di masa lalu. Namun keputusan ini diambil bahwa dengan berakhirnya intervensi RAMSI akan menjadi tantangan bagi Kepulauan Solomon karena pemulihan kedaulatan penuh dan

keseimbangan diplomatik sepenuhnya akan berada di tangan Kepulauan Solomon. Sebagai bagian dari pemulihan kedaulatan penuh di Kepulauan Solomon, hal ini juga melibatkan pembentukan kembali kerja sama keamanan internasional. Normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok akan meningkatkan kerja sama kolektif dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*Bi-Partisan Task Force*, 2019).

Sementara itu dalam kepentingan ekonomi, Tiongkok merupakan mitra strategis bagi Kepulauan Solomon. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar bagi Kepulauan Solomon dengan perbandingan volume perdagangan yang mencapai 14 kali lipat dari Taiwan. Menurut data dari Bank Dunia, pada tahun 2017, Kepulauan Solomon mengeksport komoditas senilai \$554,8 juta atau dua pertiga dari total eksportnya yang mana sekitar 87% adalah produk kayu (Zhang, 2019). Menurut Analisa dari *Bi-Partisan Task Force* jika dibandingkan dari perspektif perdagangan, PDB Tiongkok lebih besar 20 kali lipat daripada Taiwan. Meskipun ekonomi keduanya saling terintegrasi, Taiwan secara notabene masih bergantung pada Tiongkok. Selain itu Kepulauan Solomon memfokuskan kebijakan pada pembangunan infrastruktur melalui *National Development Strategy 2016-2035*, yang mana hal ini selaras dengan kerja sama dengan Tiongkok dalam BRI terutama dalam bidang infrastruktur. Jika dibandingkan dengan Taiwan, investor Taiwan tidak

memiliki ketertarikan berinvestasi dalam pembangunan ekonomi (Sogavare, 2019)

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon terhadap Tiongkok dengan menyepakati kerja sama BRI. Penulis melakukan analisa data melalui pendekatan determinan kebijakan luar negeri dari William D Coplin.

Pertama, pada konteks internasional perubahan geopolitik terjadi akibat dari peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan. Amerika Serikat yang fokus untuk mempertahankan hegemoninya melalui kontrol ekonomi dan militer dengan penjualan senjata yang meningkat ke Taiwan setiap tahunnya serta keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* menunjukkan bahwa inkonsistensi negara Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Solomon dan memilih untuk beralih ke Tiongkok.

Kedua, pada politik domestik Kepulauan Solomon, terdapat aktor birokrasi yang mempengaruhi pengambil keputusan dalam merubah kebijakan luar negerinya yakni *Bi-Partisan Task Force* dan MFAET. *Bi-Partisan Task Force* memiliki kewenangan dalam menganalisa hubungan luar negeri dengan Tiongkok dan Taiwan dan memberikan kesimpulan tersebut kepada pembuat keputusan. Serta MFAET yang memiliki peran penting dalam pembentukan kerja sama dan

peninjauan manfaat melalui informasi yang diperoleh *Bi-Partisan Task Force* untuk diteruskan kepada pembuat keputusan.

Ketiga, faktor kondisi ekonomi dan militer. Faktor ini berkaitan ketidakstabilan internal yang dialami oleh Kepulauan Solomon melalui intervensi RAMSI pada kerusuhan tahun 2006. Pasca berakhirnya RAMSI kedaulatan penuh dan keseimbangan diplomatik sepenuhnya akan berada di tangan Kepulauan Solomon, hal ini juga melibatkan pembentukan kembali kerja sama keamanan internasional. Normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok akan meningkatkan kerja sama kolektif dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu terdapat kepentingan ekonomi yang strategis dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar bagi Kepulauan Solomon. Kesepakatan kerja sama BRI ini selaras pada pembangunan infrastruktur melalui *National Development Strategy 2016-2035* oleh Kepulauan Solomon, yang mana Taiwan tidak mampu menyediakan pembangunan infrastruktur bagi Kepulauan Solomon.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2019). *China Signs Deal to Lease Pacific Islands in Solomons*. Diakses pada tanggal 25 November 2021 melalui https://www.business-standard.com/article/pti-stories/china-signs-deal-to-lease-pacific-island-in-solomons-119101700699_1.html
- BBC. (2011). *China Overtakes Japan as World's Second Biggest Economy*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2011 melalui <https://www.bbc.com/news/business-12427321>
- Biddick, Thomas V. (1989). *Diplomatic Rivalry in the South Pacific*. Asian Survey, vol 29 no.8. University of California Press. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 melalui <https://www.jstor.org/stable/2644627>
- Bi-Partisan Task Force. (2019). *Review of Solomon Islands Relations with People's Republic of China and Republic of China*. Office of the Prime Minister and Cabinet; Honiara
- China Embassy. (2021). *China's International Development Cooperation with Solomon Islands-Policy, Project, and Goals*. Diakses pada tanggal 29 Mei 2021 http://sb.chineseembassy.org/eng/zgyw_12/t1869825.htm
- Coplin, William D. (2003). Pengantar Politik Internasional; Suatu Telaah Teoritis. Terjemahan Marsedes Marbun. Sinar Baru:Bandung
- Dugis, Vinsensio. (2007). *Analysing Foreign Policy Change*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 8 Mei 2021 melalui https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy
- GCR Staff. (2021). *Chinese Firm CCECC to Build Seven Facilities for 2023 Pacific Games in Solomon Islands*. Diakses pada tanggal 16 November 2021 melalui <https://www.globalconstructionreview.com/chinese-firm-ccecc-build-seven-facilities-2023-pac/>
- GCR STAFF. (2019). *Chinese Groups target \$825m on Mining and Infrastructure in Solomon Islands*. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021 melalui <https://www.globalconstructionreview.com/news/chinese-groups-target-825m-mining-and-infrastructure/>

- Kabutaulakan, Tarcus Tara. (2010). *Milking the Dragon in Solomon Islands*. Manoa. University of Hawai. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 melalui https://www.researchgate.net/publication/292887818_Milking_the_dragon_in_Solomon_Islands
- Li, Jason. (2020). *Solomon Island: A Pacific Linchpin is Pulled*. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021 melalui <https://thediplomat.com/2020/01/solomon-islands-a-pacific-linchpin-is-pulled/>
- Ministry of Foreign Affairs & External Trade. (2016). *MFAET Corporate Plan 2014-2017*. Solomon Islands Government. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021 melalui <http://www.mfaet.gov.sb/resources/strategies-policies/18-foreign-affairs-sp/1-mfaet-corporate-plan-2014-2017.html>
- Reuters. (2019). *U.S. Reassessing Aid to Solomon Islands After Taiwan Ties Cut*. Diakses pada tanggal 20 November 2021 melalui <https://www.reuters.com/article/us-taiwan-diplomacy-usa-solomons-idUSKBN1W32RL>
- Ride, Anouk. (2019). *Riots in Solomon Islands: The Day After*. Diakses pada tanggal 9 Mei 2021 melalui <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/riots-solomon-islands-day-after/>
- Sogavare, Mannaseh. (2019). *Statement by the Prime Minister Hon. Manasseh Sogavare on Switch to China*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 melalui <https://www.solomontimes.com/news/statement-by-the-prime-minister-hon-manasseh-sogavare-on-switch-to-china/9362>
- Solomon Islands Government. (2021). *Solomons-China Relations Grows Stronger*. Diakses pada tanggal 18 November 2021 melalui <https://solomons.gov.sb/solomons-china-relations-grows-stronger/>
- Szadizewski, Henryk. (2021). *A Search for Coherence: The Belt and Road Initiative in the Pacific Islands*. *The China Alternative: Australian National University Press*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 melalui https://www.researchgate.net/publication/349781900_A_Search_for_Coherence_The_Belt_and_Road_Initiative_in_the_Pacific_Islands
- Trading Economics. (n.d). *Solomon Islands Export to China*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021 melalui <https://tradingeconomics.com/solomon-islands/exports/china>
- Liu, Wei. (2018). *China's Belt and Road Initiatives Economic Geography Reformation*, Shanghai Jiao Tong University Press:Shanghai
- Westerman, Ashley. (2019). *Some Pacific Islands Nations Are Turning To China. Climate Change Is A Factor* diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui <https://www.npr.org/2019/11/23/775986892/some-pacific-island-nations-are-turning-to-china-climate-change-is-a-factor>
- Wyeth, Grant. (2017). *RAMSI Ends; What's Next for the Solomon Islands ?*. diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui <https://thediplomat.com/2017/06/ramsi-ends-whats-next-for-the-solomon-islands/>
- Yin, Ozzy dan Frances Huang. 2018. "More allies voice support for Taiwan's inclusion in UN activities." *Focus Taiwan*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021. <http://focustaiwan.tw/news/aipl/201809290003.aspx>.
- Zhang, Denghua dan Transform Aqorau. (2019). *Diplomatic Switch? Solomon Islands*

Relations with Taiwan or China. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 melalui <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/diplomatic-switch-solomon-islands-relations-taiwan-or-china>

Zhang, Denghua. (2019). "Perceiving China's Influence in the Pacific: The Case of Solomon Islands. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 melalui <https://thediplomat.com/2019/10/perceiving-chinas-influence-in-the-pacific-the-case-of-solomon-islands/>

Zhang, Denghua. (2020). *Comparing China's and Taiwan's Aid to the Pacific*. diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 melalui <https://devpolicy.org/comparing-chinas-and-taiwans-aid-to-the-pacific-20200120/>